

JURNAL

UPAYA KEPOLISIAN RESORT TOBA SAMOSIR DALAM PROSES PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA



Disusun oleh :

Taripar Rolas Siahaan

NPM : 100510493

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**UPAYA KEPOLISIAN RESORT TOBA SAMOSIR DALAM PROSES
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**



Diajukan oleh :

TARIPAR ROLAS SIAHAAN

NPM : 100510493
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 22 Januari 2015

P.Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta


(Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., L.LM)



UPAYA KEPOLISIAN RESORT TOBA SAMOSIR DALAM PROSES PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

Taripar Rolas Siahaan, P.Prasetyo Sidi Purnomo

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas atma Jaya Yogyakarta**

ABSTRACT

Narcotics and psychotropic substances is a very serious crime. All over the world are trying to eradicate it, not least in Indonesia. Number of narcotics drugs and psychotropic substances in Indonesia is increasing and is now very worrying. Narcotics and psychotropic now not only affect adults, children were already vulnerable to become victims of narcotic drugs and psychotropic substances. Toba Samosir as one one of the districts in Indonesia also increased numbers narcotics drugs and psychotropic substances. Therefore to prevent an increase in the crime of narcotics drugs and psychotropic substances, it takes the efforts of the Police, especially the Police Toba samosir. There were two attempts in the prevention and eradication of narcotics drugs and psychotropic substances, namely the efforts of Non-Penal and Penal effort. Non-Penal effort is more effective to prevent the crime of narcotics and psychotropic this. But this effort the Police Toba samosir experiencing various obstacles both from internal and external. Therefore in the prevention and eradication of this process, The Police Toba Samosir need the support off all parties, both the government and society.

Keywords: Crime of narcotics and psychotropic, Toba Samosir Police Resort, Non-penal efforts, Penal effort.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana semakin meningkat, salah satu masalah yang sangat serius yang melanda banyak negara seperti Singapura, Cina termasuk Indonesia adalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, karena hampir semua lapisan masyarakat bisa ditembus jaringan peredaran narkotika yang dapat merugikan bangsa. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini merupakan salah satu masalah serius yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena memiliki dampak negatif bagi korban yang dapat menghalangi mereka untuk berperan aktif dalam memberikan kontribusi dalam proses pembangunan dan melanjutkan proses regenerasi yang berkualitas bagi bangsa Indonesia.

Pada awalnya Narkotika dan Psikotropika merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Akan tetapi, akibat dari tindakan sebagian orang, narkotika dan psikotropika disalahgunakan. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan obat ialah pemakaian obat tanpa petunjuk medis.¹ Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika telah sejak lama dilakukan. Bahkan konferensi pertama psikotropika telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1971 hingga 21 Februari 1971 yang dilaksanakan oleh *The United Nations Conference for the Adoption of Protocol on Psychotropic Substance* di Wina, Austria.² Konferensi ini menghasilkan *Convention Psychotropic Substance* 1971, yang isinya mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan psikotropika, serta mencegah, pemberantasan

¹ Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Hlm 5.

² Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 1.

penyalahgunaannya dengan membatasi penggunaan hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Latar belakang penegakan hukum terhadap narkoba dan psikotropika didasarkan atas suatu asumsi bahwa terdapat korelasi antara para pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini dengan sikap negatif yang di timbulkan, antara lain mempunyai sikap dan tingkah laku yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal.³

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, tetapi juga dapat berdampak negatif. Maksudnya dengan kemajuan teknologi, juga ada masalah peningkatan kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum. Sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia tentu saja merupakan elemen yang pertama kali ataupun yang secara langsung bersinggungan dengan para pelaku kejahatan. Sebagai kejahatan yang angkanya selalu meningkat dari tahun ke tahun, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika merupakan target utama dari proses pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya dalam mengurangi peningkatan angka kejahatan narkoba dan psikotropika tersebut, telah banyak dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia baik secara represif maupun preventif. Selain itu sanksi yang diancamkan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sangat berat. Akan tetapi semua upaya tersebut seakan tidak mampu mengurangi peningkatan kejahatan tersebut. Menurut data Badan Narkoba Nasional, angka

³ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 6.

penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang berhasil diungkap Kepolisian Negara Republik cenderung meningkat lebih dari 5%, hanya pada rentang 2009 hingga 2010 mengalami penurunan sebesar 13%.⁴ Di wilayah Sumatera Utara, yang termasuk dalam 5 besar penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, mengalami peningkatan lebih dari 200 kasus setiap tahunnya.⁵ Sebagai daerah yang letaknya cukup strategis karena merupakan jalur persinggahan dan dilalui oleh jalur Lintas Sumatera, Kabupaten Toba Samosir termasuk daerah yang rawan bagi penyebaran narkoba dan psikotropika. Kabupaten Toba Samosir merupakan salah satu pemberi sumber terbesar angka peningkatan tindak pidana narkoba dan psikotropika, dan terbagi dalam 3 wilayah besar yaitu Balige, Porsea dan Laguboti. Hal ini terbukti dengan adanya data dari Badan Narkotika Kabupaten Toba Samosir yang menyebutkan 65% lebih tahanan di Polres Tobasa terkait dengan narkoba dan psikotropika.⁶ Dari beberapa fakta tersebut, timbul pertanyaan mengapa penyalahgunaan narkoba dan psikotropika selalu meningkat khususnya di Kabupaten Toba Samosir.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya dari Kepolisian Resort Toba Samosir dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika ?

⁴ <http://www.bnn.go.id/arsip/data-tindak-pidana-narkoba/data-tindak-pidana-narkoba-tahun-2007-2013.html>, Data Tindak Pidana Narkoba Tahun 2007 – 2013, 20 Maret 2014

⁵ <http://www.bnn.go.id/arsip/data-tindak-pidana-narkoba/data-tindak-pidana-narkoba-provinsi-sumatera-utara-tahun-2007-2013.html>, Badan Narkotika Nasional, Data Tindak Pidana Narkoba Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007-2013, 10 Maret 2014

⁶ <http://www.pemkabtobasa.co.id/news/bnk-tobasa-lakukan-sosialisasi-bahaya-narkoba/bagian-humas-dan-protokol-setdakab-tobasa>, Kasat Narkoba Polres Tobasa : Enam Puluh Lima Persen Tahanan Polres Tobasa Adalah Yang Terkait Kasus Narkoba, 20 Maret 2014

2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Toba Samosir dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika ?



PEMBAHASAN

1. Upaya Kepolisian Resort Toba Samosir dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.

Langkah-langkah yang diterapkan Polres Toba Samosir dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika yaitu dengan cara penanggulangan secara penal dan non penal.

a. Upaya penanggulangan secara Non Penal.

1) Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai dari upaya ini adalah terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

2) Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan narkotika dan psikotropika melalui pengendalian dan pengawasan langsung dengan tujuan agar potensi kejahatan (ancaman potensial) itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

Salah satu alat perlengkapan Polres Toba Samosir yang memegang peranan penting dalam tugas preventif adalah bagian BinLuh (Pembinaan dan Penyuluhan) Satuan Reserse Narkoba Polres Toba Samosir. Adapun yang menjadi tugas pokok BinLuh Satuan Reserse Narkoba Polres Toba Samosir tersebut adalah melakukan pembinaan dan penyuluhan masyarakat.

Di dalam melakukan tugas pokoknya tersebut BinLuh Satuan Reserse Narkoba Polres Toba Samosir tersebut berkoordinasi dengan Badan Narkotika Kabupaten Toba Samosir, Komite HIV & AIDS Rumah Sakit HKBP Balige dan aktivis-aktivis anti narkotika dan psikotropika.

Adapun bentuk pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Toba Samosir yaitu pengarahan dan pendayagunaan masyarakat yang dilakukan dengan metode atau cara :

1. Pendekatan Langsung

Yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melakukan kontak langsung baik dengan perseorangan maupun dengan kelompok.

2. Penerangan masyarakat

Yaitu segala usaha dan kegiatan untuk memberitahukan dan menjalankan sesuatu yang bersifat petunjuk yang ditujukan untuk :

- a. Pemupukan kesadaran hukum
- b. Unsur-unsur pendidikan masyarakat

3. Bimbingan

Yaitu memberikan bimbingan kepada masyarakat khususnya orang-orang yang pernah menjadi pecandu narkotika dan psikotropika agar tidak kembali menggunakan narkotika dan psikotropika.

4. Patroli

Berupa patroli keliling jalan atau tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat-tempat penjualan dan tempat-tempat yang sering digunakan untuk pesta narkotika dan psikotropika.

5. Kerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan

Mengadakan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan (seperti : organisasi kepemudaan), dengan cara memberikan informasi kepada aparat kepolisian mengenai adanya peredaran narkoba dan psikotropika yang terjadi di wilayahnya.

6. Kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga agama

Dengan cara penanaman nilai-nilai agama dan pendidikan yang baik terhadap masyarakat khususnya generasi muda, karena dengan pendidikan yang baik serta penanaman nilai-nilai agama dan nilai moral yang lebih aktif akan menciptakan generasi muda yang berkualitas, baik kemampuan inteligensianya maupun akhlaknya.

b. Upaya penanggulangan secara Penal

Upaya penanggulangan secara penal bagi tindak pidana narkoba dan psikotropika menitikberatkan pada upaya represif. Upaya represif antara lain meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika yang telah terjadi.

Tindakan penegakan hukum yang dilakukan anggota Polres Toba Samosir dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika diantaranya :

- a. Melakukan operasi narkoba dan psikotropika yang ditujukan kepada tempat-tempat yang dianggap berpotensi sebagai tempat transaksi narkoba dan psikotropika, khususnya tempat wisata atau hiburan yang ada di wilayah Toba Samosir.
- b. Menangkap dan menahan para pemakai dan penjual atau pengedar narkoba dan psikotropika beserta barang bukti, lalu diadakan penyidikan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kemudian diproses di pengadilan.

Selain upaya penegakan hukum dalam usaha menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika, upaya lain dari Polres Toba Samosir melalui Satuan Reserse Narkoba ialah melakukan kerja sama dengan instansi terkait di wilayah hukum Polres Toba Samosir seperti dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Toba Samosir, Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir dan Komite HIV dan AIDS Rumah Sakit HKBP Balige, hal ini bertujuan untuk meminimalisir tindak pidana narkoba yang dilakukan terutama bagi yang telah mengalami ketergantungan pada narkoba dan psikotropika.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Toba Samosir dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polres Toba Samosir dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba dan psikotropika. Hambatan tersebut antara lain :

a. Hambatan dari dalam (intern)

- 1) Kurangnya koordinasi di lapangan dan keterbatasan personil pada saat akan mengadakan operasi-operasi/ razia di tempat-tempat yang menjadi obyek sasaran.
- 2) Masalah kurangnya sarana dan prasarana dalam proses penyuluhan dan pembinaan yang menunjang proses pencegahan terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika, seperti laptop dan proyektor.
- 3) Kurangnya koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi terkait, baik di dalam proses pencegahan maupun proses pemberantasan tindak pidana narkoba. Dalam proses pencegahan, Polres Toba Samosir tidak dapat bekerja sama secara efektif dengan Badan Narkotika Kabupaten Toba Samosir karena

status Badan Narkotika Kabupaten yang belum merupakan badan yang berdiri sendiri seperti halnya Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara ataupun Badan Narkotika Nasional. Hal ini terjadi akibat belum adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menetapkan keberadaan Badan Narkotika Kabupaten Toba Samosir, sehingga kedudukannya masih berada di bawah Dinas Kesejahteraan Masyarakat.

- 4) Adanya oknum di internal Polres Toba Samosir ataupun di Polsek-Polsek yang wilayah hukumnya berada di dalam wilayah hukum Polres Toba Samosir yang memberikan/ membocorkan informasi kepada orang luar saat akan diadakan operasi/razia. Serta adanya ketidakprofesionalisme dari oknum anggota Polisi sendiri, seperti adanya oknum anggota Polisi yang tidak menangkap pengedar narkoba dan psikotropika karena adanya hubungan keluarga ataupun karena telah dibayar untuk menjadi “backing” bagi pengedar narkoba dan psikotropika.
- 5) Adanya kewajiban bagi setiap kepala satuan untuk memiliki laporan tentang penindakan tindak pidana yang harus diberikan setiap bulannya. Kewajiban untuk memiliki laporan setiap bulannya ini membuat proses penegakan tidak dapat berjalan efektif dan maksimal, karena pemakai ataupun pengedar narkoba dan psikotropika yang sebelumnya sudah diketahui oleh pihak Polres Toba Samosir khususnya Satuan Reserse Narkoba tidak langsung ditindak/ditangkap, tetapi dibiarkan terlebih untuk ditindak bulan selanjutnya. Oleh karena itu tindak pidana narkoba dan psikotropika tersebut tidak akan habis, akan tetapi semakin menyebar.
- 6) Tidak adanya laboratorium yang dapat digunakan untuk memeriksa alat bukti tindak pidana narkoba dan psikotropika. Letak Toba Samosir yang jauh dari

kota Medan sangat menyulitkan mereka dalam proses pemeriksaan barang bukti. Menurut Aiptu Zulkifli dan Briptu Sihol Tamba, lamanya perjalanan darat yang memakan waktu 6 jam tersebut tidak efisien.

b. Hambatan dari luar (ekstern)

- 1) Keadaan geografis Toba Samosir yang berada di wilayah pegunungan merupakan tantangan bagi Satuan Reserse Narkoba Polres Toba Samosir. Medan yang berat dan belum semua wilayah Toba Samosir yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor terkadang membuat operasi penangkapan yang sudah disusun sedemikian menjadi gagal, karena pemakai ataupun pengedar narkoba dan psikotropika tersebut dapat melarikan diri ke hutan ataupun gunung.
- 2) Adanya ketidakpedulian masyarakat di dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika.. Tidak hanya dalam proses pencegahan, ketika dalam proses pemberantasan, masyarakat juga dapat menjadi salah satu hambatan. Adanya perlawanan warga terhadap Polisi ketika akan menangkap pemakai ataupun pengedar narkoba dan psikotropika yang merupakan anggota warga ataupun anggota keluarga mereka. Perlawanan warga tersebut dapat berbentuk penyerangan langsung, menghalangi Polisi untuk masuk ke kampung atau rumah mereka, penyembunyiaan target operasi hingga membantu target operasi dalam melarikan diri.
- 3) Semakin kuatnya jaringan pengedar narkoba dan psikotropika merupakan salah satu hambatan terbesar dalam proses pencegahan dan pemberantasan narkoba dan psikotropika. Toba Samosir yang dilalui oleh jalur lintas sumatera merupakan tempat favorit bagi pengedar dan pemakai narkoba dan psikotropika untuk bertransaksi. Hal ini terjadi karena Toba Samosir merupakan titik pertemuan transaksi antara narkoba dan psikotropika yang berasal dari

ataupun menuju ke Aceh, Medan dan Belawan dengan yang berasal dari ataupun menuju Dumai, Batam, Tanjung Pinang dan Jakarta. Tempat-tempat tersebut merupakan sarang dari mafia narkoba dan psikotropika yang memiliki jaringan yang kuat di Indonesia.

- 4) Belum adanya tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan psikotropika di Toba Samosir. Tempat rehabilitasi merupakan salah satu penunjang agar tindak pidana narkoba dan psikotropika tidak mengalami peningkatan. Sejauh ini pemakai narkoba dan psikotropika yang tertangkap dan telah divonis oleh Pengadilan di kabupaten Toba Samosir dimasukkan ke dalam Lembaga Perasyarakatan Toba Samosir. Pemakai yang bertemu dengan pengedar narkoba dan psikotropika di dalam Lembaga Perasyarakatan tersebut, dapat menjadi pengedar potensial sesudah keluar dari Lembaga Perasyarakatan tersebut.

Adanya hambatan-hambatan di atas ternyata dapat menyulitkan kinerja Kepolisian secara keseluruhan. Akan tetapi Kepolisian Resort Toba Samosir khususnya Satuan Reserse Narkoba tetap berupaya untuk berperan aktif meskipun dengan sarana operasional yang minim dan keterbatasan dana. Kerja sama yang dibangun secara baik antar petugas kepolisian setidaknya merupakan suatu langkah yang baik dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Polres Toba Samosir.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dianalisa tentang upaya kepolisian dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika khususnya di wilayah hukum Polres Toba Samosir, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

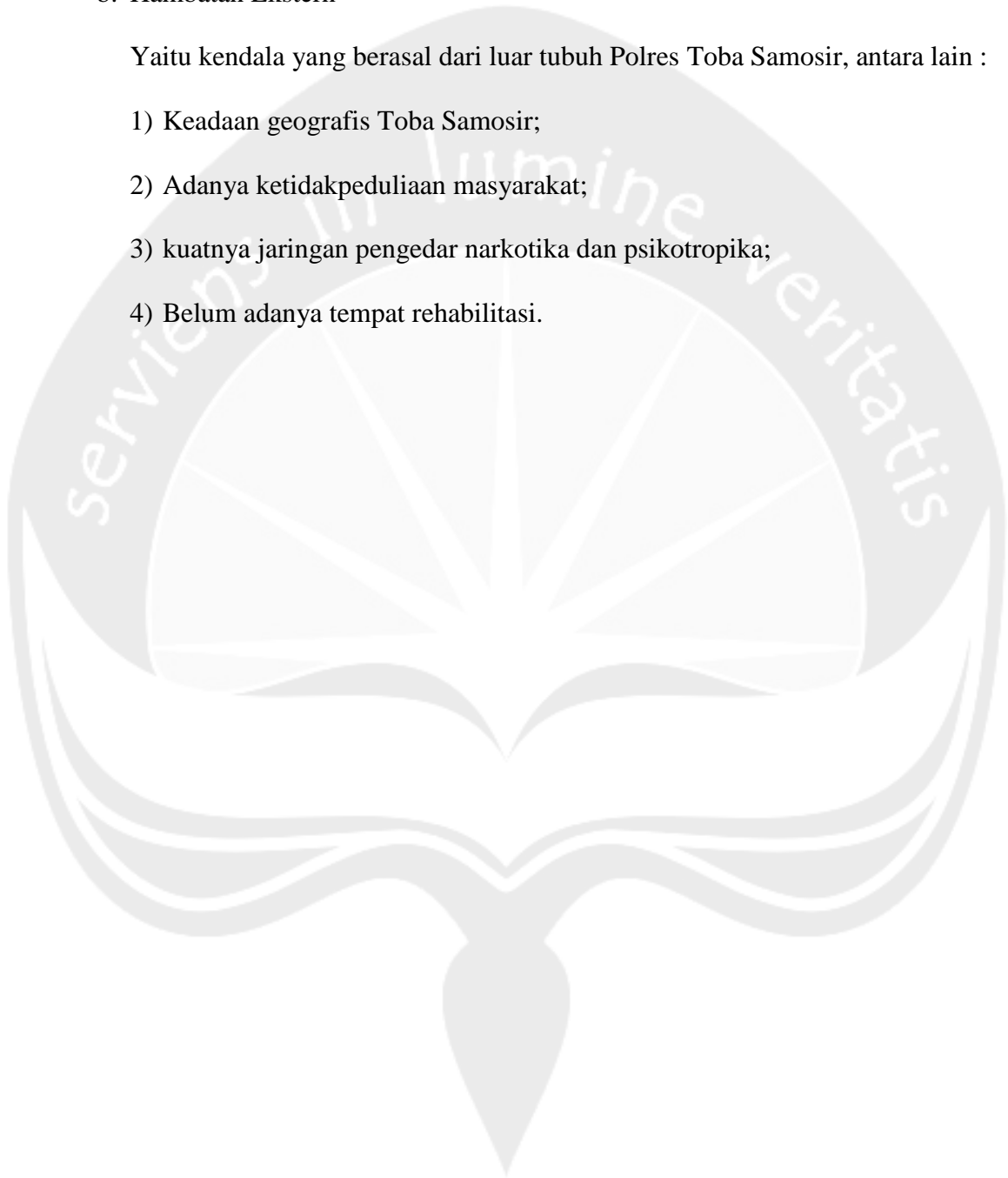
1. Upaya Polisi sebagai lembaga penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba dan psikotropika di wilayah hukum kabupaten Toba Samosir dapat dilihat dari kinerja jajaran Polres Toba Samosir yang secara aktif baik terbuka maupun tertutup, melakukan kerja sama dengan instansi-instansi lainnya dan masyarakat dalam memutus mata rantai peredaran narkoba dan psikotropika. Polres Toba Samosir dalam hal ini mempunyai dua langkah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba dan psikotropika ini, yaitu upaya Non-Penal dan upaya Penal. Polres Toba Samosir lebih memaksimalkan pada upaya Non-Penal yaitu tindakan pre-emptif dan preventif(pencegahan), karena upaya ini dirasa lebih efektif dalam menekan peningkatan angka tindak pidana narkoba dan psikotropika dibandingkan dengan upaya Penal (penindakan).
2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Polres Toba Samosir dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika yaitu :
 - a. Hambatan Intern
Yaitu kendala yang berasal dari dalam tubuh Polres Toba Samosir, antara lain :
 - 1) Kurangnya koordinasi di lapangan dan keterbatasan personil;
 - 2) kurangnya sarana dan prasarana;
 - 3) Kurangnya koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi terkait;
 - 4) Adanya ketidakprofesionalisme dari oknum anggota Polisi;

- 5) Adanya kewajiban untuk memiliki laporan tentang penindakan tindak pidana yang harus diberikan setiap bulannya;
- 6) Tidak adanya laboratorium untuk memeriksa alat bukti.

b. Hambatan Ekstern

Yaitu kendala yang berasal dari luar tubuh Polres Toba Samosir, antara lain :

- 1) Keadaan geografis Toba Samosir;
- 2) Adanya ketidakpedulian masyarakat;
- 3) kuatnya jaringan pengedar narkoba dan psikotropika;
- 4) Belum adanya tempat rehabilitasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alatas, Husein dan Madiyono, Bambang. 2001, *Penanggulangan Korban Narkoba Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hadiman, H. 1999, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Jakarta, Primer Koperasi Mitra Usaha Sbmimas Polri.
- Hadiman, H. 2001, *Peran Lingkungan Pendidikan dan Masyarakat dalam Pencegahan Bahaya Madat*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah – Lembaga Ilmu Pengetahuan, Jakarta.
- Hadiman, H. 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta.
- Karjadi, M. 1978, *Polisi Filsafat dan Perkembangan Hukumnya*, PT Karya Nusantara, Bandung.
- Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sularso, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, Dharma Bakti, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tabah, Anton. 1990, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Internet :

- Badan Narkotika Nasional, 2013, <http://www.bnn.go.id/arsip/data-tindak-pidana-narkoba/data-tindak-pidana-narkoba-provinsi-sumatera-utara-tahun-2007-2013.html>
Diakses Tanggal 10 Maret 2014